

# DAMPAK EURO TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL DAN STRATEGI MENEMBUS PASAR PERDAGANGAN EROPA

Ir. Hariyadi B. Sukamdani, M.M.\*)

Cita-cita bangsa Eropa untuk bersatu kini hampir tercapai dengan terbentuknya mata uang tunggal 'euro'. Kendati Inggris, Denmark, Swedia dan Yunani belum bergabung dalam euro, namun ke-11 negara Eropa lainnya sudah bersepakat untuk memantapkan dan menstabilkan mata uang tunggal tersebut. Inggris memang paling enggan masuk kedalam zona euro, tapi di London, yang diyakini sebagai pusat keuangan Eropa, merespon secara positif berbagai upaya untuk memuluskan persiapan menuju mata uang tunggal tersebut. Banyak kalangan yang menilai, euro bakal menjadi mata uang internasional yang cukup berpengaruh dan tangguh setelah dolar AS, bahkan lebih dari itu.

Terbentuknya mata uang

tunggal Eropa merupakan komitmen bangsa Eropa untuk lebih menstabilkan ekonominya. Oleh karena itu ada yang menilai bahwa pembentukan euro tidak lebih hanya untuk kepentingan bangsa Eropa. Beberapa ekonom Jerman berpendapat, peluncuran euro adalah untuk meningkatkan efisiensi perekonomian Eropa sendiri, sehingga memiliki tujuan jangka panjang untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Eropa sendiri. Oleh karena itu, kata mereka, para pelaku non-Eropa, termasuk Indonesia, tidak bisa terlalu banyak berharap dari pelaksanaan mata uang tunggal tersebut. Sebab euro dibuat untuk kepentingan Eropa sendiri! Disepakatinya mata uang tunggal tersebut disebabkan para pelaku bisnis di Eropa sering merasa cemas dengan berfluk-

tuasinya dolar AS sehingga mengganggu proyeksi bisnis mereka. Pembentukan euro merupakan "siaga satu" bangsa Eropa dari dominasi dan penetrasi dolar AS.

Lalu, apakah *moment* terbentuknya euro itu kita lewatkan begitu saja? Tentu saja tidak. HIPMI memandang terbentuknya euro sebagai instrumen untuk lebih meningkatkan ekspor komoditas Indonesia. Euro dapat dijadikan sebagai perantara bagi transaksi perdagangan di negara-negara Eropa dan sebagai alat pembayar yang stabil selain dolar AS. Euro dapat membuka peluang mengurangi dominasi dan ketergantungan kita terhadap dolar AS. Para analis ekonomi dan pelaku ekonomi juga sepakat bahwa efisiensi ekonomi di negara-negara Eropa akan meningkat-

\*) Ir. Hariyadi B. Sukamdani, M.M adalah Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI).

kan permintaan produk impor. Dengan kian menguatnya nilai tukar euro maka akan menguntungkan ekspor kita karena perbedaan nilai tukar tersebut.

Kita berharap pemberlakuan mata uang tunggal euro berdampak positif bagi ekspor komoditas Indonesia ke negara-negara Eropa. Ekspor kita akan lebih besar lagi, sehingga lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ekspor Indonesia ke Uni Eropa sejak tahun 1987 hingga 1997 naik secara mengesankan, yakni sebesar 400% dari US\$1,5 miliar menjadi US\$7,8 miliar. Eropa memiliki potensi pasar cukup besar. Kawasan tersebut memiliki pangsa 20% GDP dunia, jumlah penduduk 290 juta jiwa, jumlah ekspor antarnegara peserta euro hampir 17% dari total ekspor dunia dan berkawasan dua kali ukuran Jepang atau sedikit lebih besar daripada AS.

Oleh karena itu, menjadi sangat wajar jika para pelaku ekonomi dan otoritas suatu negara sangat peduli pada kawasan ini. Untuk mengantisipasi euro pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menerobos pasar Eropa. *Pertama*, bank sentral memberikan kebebasan kepada bank-bank devisa untuk mengkonversikan *legacy currencies* (11 mata uang anggota euro) terhadap euro. *Kedua*, BI akan mengumumkan kurs wesel ekspor, kurs untuk transaksi dengan pemerintah dan kurs neraca dalam valuta yang termasuk dalam *legacy currencies* yaitu

schilling Austria (ATS), franc Belgia (BEF), mark Jerman (DEM), guilder Belanda (NLG), franc Perancis (FRP), lira Italia (ITL) dan euro. *Ketiga*, sampai dengan penerbitan banknotes euro pada tahun 2002, BI masih akan menerima *legacy currencies* yaitu ATA, BEF, DEM dan FRP. Selain itu BI juga setuju dengan gagasan untuk mengkonversikan sebagian cadangan devisa dalam bentuk euro. Cadangan devisa Indonesia – posisi cadangan devisa bersih per 30 Oktober 1998 mencapai US\$14,212 miliar – selama ini ditetapkan dalam bentuk *basket currency* seperti yen, dolar AS, DM dan pounsterling.

## Proyeksi Ekspor Indonesia Tahun 1999

Terbentuknya mata uang tunggal Eropa hendaknya menyadarkan kita bahwa Eropa, bangsa yang dulu dikenal sebagai penjajah kelas dunia telah menabuh *gong* mengenai perlunya efisiensi dan daya saing tinggi. Mulai hari ini kita harus berpacu dengan waktu. Kita harus terus mencari dan mencari berbagai upaya untuk meningkatkan ekspor, baik secara kualitas maupun kuantitas. Persaingan yang sangat tajam di pasar internasional sekarang ini, hampir bisa dipastikan akan makin tajam lagi pada beberapa kurun mendatang. Menunda langkah, bisa jadi hanya akan membawa kita pada kesulitan yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, kita harus segera memperdalam struktur in-

dustri dan mengembangkan industri berbasis lokal karena industri ini tahan terhadap guncangan badai krisis ekonomi. Untuk menuju ke arah sana kita harus segera melaksanakan program aksi untuk menebas semua hambatan birokrasi dan hambatan-hambatan lainnya yang sampai kini masih membebankan dunia usaha.

Dari semua itu, yang lebih penting lagi adalah stabilitas politik. Sebab faktor inilah yang menjadi kunci bagi berbagai upaya pemulihan ekonomi nasional. Hal ini perlu ditegaskan berkenaan dengan menurunnya kegiatan ekspor melalui Pelabuhan Tanjung Priok pada akhir Maret. Penurunan tersebut, menurut Kepala Unit Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Priok, Agustomo, karena hampir sebagian besar *buyer* membatasi kontrak ekspornya hingga Mei 1999. Mereka menunggu perkembangan selanjutnya setelah prosesi pemilu nanti. Penurunan ekspor itu baru terlihat pada akhir Maret mendatang, karena penyerahan barang dan transaksi berbeda dalam kurun waktu dua bulan. Penundaan *buyer* terhadap order produk Indonesia hingga Mei ini otomatis akan mengurangi arus ekspor.

Berdasarkan proyeksi *Econit Economic Outlook 1999* yang dipublikasikan baru-baru ini, ekspor Indonesia diperkirakan belum membaik tahun ini. Angkanya diperkirakan hanya US\$48,8 miliar atau turun 2%

dibanding nilai ekspor tahun 1998. Belum membaiknya ekspor tersebut disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak mendukung. Faktor-faktor itu, termasuk penurunan harga-harga komoditas andalan Indonesia seperti minyak bumi, tekstil dan komoditas pertanian yang cenderung menurun pada 1999.

Econit juga mengevaluasi kinerja perdagangan selama 1998, di mana sektor ekspor yang seharusnya diuntungkan oleh depresiasi Rp ternyata tidak terjadi. Sepanjang 1998 ternyata ekspor anjlok karena porsi *non-traded goods* yang sangat besar, kesulitan dalam pembiayaan perdagangan, turunnya permintaan ekspor dunia serta tidak adanya strategi dan kebijakan untuk memacu ekspor. Selama Januari-Oktober 1998, menurut catatan Econit, ekspor non-Migas Indonesia turun sebesar 1% bahkan ekspor Migas turun drastis sebesar 31,3% akibat anjloknya harga minyak dunia. Dengan demikian secara keseluruhan ekspor Indonesia pada tahun 1998 turun sebesar 7%.

Beberapa komoditas yang selama ini memberikan kontribusi besar terhadap ekspor Indonesia juga mengalami penurunan kinerja yang tajam. Dalam kelompok produk unggulan, misalnya tekstil, ekspornya hanya tumbuh 8,2%, jauh di bawah pertumbuhan rata-rata periode 1985-1995 yang mencapai 27,6%. Pakaian jadi yang selama ini memberikan kontribusi besar dalam kelompok tekstil malah

merosot 20,8%. Sedangkan ekspor produk elektronik yang rata-rata tumbuh 36,4% per tahun pada periode 1993-1996 justru anjlok 8,3% pada Januari-Agustus 1998. Sebaliknya, produk pertanian yang diharapkan memberi sumbangan besar ternyata belum mampu menyumbang secara berarti. Sampai Agustus 1998, ekspor komoditas pertanian baru mencapai US\$2,4 miliar atau naik 21,3% dibandingkan tahun 1997. Kontribusi produk pertanian juga masih rendah terhadap total ekspor Indonesia. Misalnya tembakau dan coklat, meskipun tumbuh 51,6% dan 44,1% pada periode Januari-Agustus 1998, kontribusinya hanya 0,3% dan 0,7% terhadap total ekspor non migas Indonesia.

Penerbitan proyeksi Econit tersebut ternyata berbeda sekali dengan optimisme pemerintah, yang dalam RAPBN 1999/2000 memproyeksikan ekspor Indonesia akan meningkat menjadi US\$52,3 miliar dibanding ekspor pada 1998 yang hanya US\$50,7 miliar. Pemerintah juga memproyeksikan transaksi berjalan akan mengalami surplus sebesar US\$1,3 miliar pada tahun anggaran 1999/2000. Pada 1998, surplus perdagangan, menurut proyeksi pemerintah, mencapai US\$22 miliar dengan surplus transaksi berjalan US\$4,5 miliar.

Secara inklusif, Depperindag memperkirakan ekspor non-Migas pada tahun ini dapat meningkat sekitar 5% dibandingkan realisasi tahun lalu, dengan

asumsi kurs rupiah bisa mencapai Rp 7.000-Rp 8.000 per dolar AS dan suku bunga bank 20%-30%. Dalam kalkulasi Depperindag, pada tahun depan ekspor non-Migas nasional diperkirakan mencapai US\$43,4 miliar, dengan kontribusi utama masih pada komoditas tekstil dan produk tekstil (TPT), produk kayu, elektronika, hasil pertanian dan pertambangan. Pertumbuhan ekspor non-Migas 1999 yang cukup optimistis itu, didorong oleh perekonomian dunia yang diperkirakan mulai membaik pada 1999 dengan pertumbuhan 2,2%, akibat meningkatnya perekonomian negara-negara Uni Eropa, menyusul berlakunya mata uang euro. Selain itu perekonomian Amerika Serikat juga diperkirakan membaik dengan dilaksanakannya program ekonomi tujuh tahun dan mulai menguatnya mata uang negara Asia yang terkena krisis ekonomi.

Optimisme juga dialami oleh para eksportir produk percetakan. Menurut Ketua Umum Peratuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) Fauzi Lubis, ekspor produk percetakan, seperti buku tulis, kertas komputer, amplop dan lain-lain pada tahun ini masih berpeluang mengalami peningkatan. Kendati secara umum pemerintah hanya menargetkan ekspor naik sekitar 5%, PPGI optimistis nilai ekspor produk grafika bisa meningkat 10%, karena memang potensinya ada dibandingkan komoditas ekspor lain. Indikasinya,

dalam lima tahun terakhir ini nilai ekspor produk percetakan terus mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 10% per tahun. Tahun lalu, nilai ekspornya diperkirakan mencapai US\$275 juta. Dan pada tahun ini, nilai ekspor barang cetakan bisa mencapai US\$300 juta, yang sebagian besar disumbangkan oleh perusahaan percetakan yang tidak integrated. Sedangkan pada 1997/98 nilai produksi industri percetakan nasional hanya sekitar US\$3 miliar. Dari jumlah itu, nilai ekspornya mencapai US\$275 juta. Dengan demikian, jumlah tersebut tidak sesuai dengan pernyataan Grup Sinar Mas, yang menyatakan sebagian besar produksi mereka diekspor.

## Peluang Ekspor

Walaupun Indonesia tertimpa krisis cukup berat, namun bukan berarti semua sektor usaha mengalami kelumpuhan total. Ada beberapa sektor usaha yang dapat bertahan, sehingga dapat menopang kelangsungan hidup bangsa. Bahkan kini muncul sinyal-sinyal terjadinya titik balik dari titik dasar (*hit the bottom*). Misalnya kontraksi ekonomi nasional tahun 1999 dapat ditekan hingga sekitar 2 persen, inflasi 20 persen, suku bunga 30 persen dan stabilisasi nilai tukar. Namun apabila pemilu gagal dan reformasi ekonomi tertunda serta masalah otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat daerah tidak ditangani sebagaimana mestinya, dapat

dipastikan tidak akan terjadi pemulihan apalagi pertumbuhan ekonomi pada tahun 1999. Bila pemilu gagal dan reformasi ekonomi tertunda, perekonomian nasional diperkirakan akan tetap berkontraksi delapan persen, inflasi 45 persen, suku bunga diatas 55 persen dan nilai tukar berkisar Rp. 12.500 per dolar AS.

Yang memperparah krisis sekarang ini adalah meningkatnya risiko politik (*political risk*) dan menurunnya kredibilitas pemerintah, sehingga gerak dunia usaha nasional terhambat dan tidak optimal dalam memanfaatkan peluang yang ada, khususnya peluang ekspor. Meskipun begitu, krisis ekonomi ini juga menciptakan peluang-peluang besar bagi dunia usaha, utamanya yang berorientasi ekspor. Dari data perdagangan dunia saat ini, seperti dilansir oleh *The Economist Intelligence Unit* menunjukkan ekspor produk *merchandise*/manufaktur sebesar US\$ 4,239 miliar, dua tahun kemudian pada 1996 nilai ekspor produk tersebut menjadi US\$ 5.127 miliar. Sementara itu, tahun 1997, sebagaimana dilaporkan Sekretariat WTO (1998) kendati Indonesia, Philipina, Korea Selatan, Malaysia dan Thailand diterpa krisis ekonomi, namun perdagangan *merchandise*/manufaktur menunjukkan *performance* yang mengesankan.

Kenaikan ekspor produk-produk *merchandise*/manufaktur pada tahun 1997 lalu mendekati dua digit, yakni sebesar 9,5%

atau merupakan pertumbuhan ekspor rata-rata tertinggi sejak dua dekade, kecuali tahun 1994. Tahun 1998, walaupun krisis ekonomi masih tetap menghantui sebagian kawasan dunia, namun ekspor produk-produk *merchandise* untuk kawasan-kawasan tertentu, seperti Amerika Utara dan Amerika Selatan, Asia Tengah dan Middle East, diprediksikan tetap meningkat. Dengan demikian, dunia usaha Indonesia masih memiliki kesempatan untuk meningkatkan ekspornya di pasar global.

Secara makro, dunia usaha Indonesia memiliki sektor-sektor industri yang potensial untuk ditingkatkan ekspornya. Sebagai gambaran industri nasional yang memiliki potensi ekspor adalah sebagai berikut:

- Industri yang orientasi ekspornya rendah atau kurang dari 10%, yakni seperti produk kertas, kimia, dan lain-lain, penyulingan minyak, semen, logam dasar baja dan besi, mesin non-elektrik, dan perlengkapan transportasi.
- Industri dengan orientasi ekspor moderat antara 10-20%, yakni produk-produk seperti makanan, minuman, barang-barang plastik, keramik, produk tanah liat dan barang-barang logam.
- Industri dengan orientasi ekspor tinggi antara 20-50%, yakni produk-produk seperti tembakau, tekstil, kulit, percetakan dan penerbitan, kimia dasar, petrokimia, kimia dasar bukan besi, perlengka-

nya dalam bentuk bank karena nantinya harus dapat menjamin garansi.

*Kedua*, menindaklanjuti penghapusan pemberitahuan ekspor barang tertentu (PEBT) mulai 1 April 1999 sehingga dapat mendorong eksportir TPT mengeksport produknya tanpa menggunakan *letter of credit* (L/C). Selama ini banyak eksportir tekstil yang lebih suka menggunakan prosedur PEBT sehingga tidak perlu membuka *letter of credit* melalui bank. Adanya kecenderungan ekspor tanpa menggunakan dokumen PEBT tersebut, dalam beberapa bulan terakhir ini karena Bank Indonesia kurang dipercaya pihak asing.

*Ketiga*, perlu adanya dukungan *trade financing* yang bisa menopang aktivitas ekonomi dunia usaha. Selama krisis ekonomi pemerintah memang telah mengeluarkan berbagai skema *trade financing*, baik yang dananya dari Bank Indonesia sendiri maupun fasilitas lainnya yang dananya bersumber dari bantuan negara lain. Fasilitas skim Bank Indonesia misalnya rediskonto *pre-shipment* dan rediskonto *post-shipment*. Juga ada fasilitas penjaminan dan atau pembiayaan, seperti skim penempatan dana Bank Indonesia di beberapa Bank Luar Negeri seperti; skim JEXIM Bank-Jepang; skim Export Finance Insurance Corporation (EFIC); dan terakhir skim MOU penggalakan Sektor Riil. Sayangnya berbagai fasilitas *trade financing* itu

tidak optimal pemanfaatannya, karena beberapa hal, seperti kurang mengenyanya sasaran dari masing-masing skim fasilitas itu dan berbelit-belitnya birokrasi pemanfaatan skema tersebut.

Oleh karena otoritas moneter dan keuangan yang berwenang memberikan bantuan pembiayaan *trade financing* tampaknya perlu melakukan *focusing* kebijakannya, sehingga mengenai sasaran yang tepat, yang dalam hal ini memfasilitasi ekspor. Disamping itu, yang sangat penting, pemerintah juga perlu meningkatkan *sense of crisis* ketika mengeluarkan kebijaksanaan / fasilitas untuk mendorong ekspor. Sehingga, karena kondisinya sedang krisis atau *emergency*, maka aturan birokrasinya juga harus berlaku darurat, tidak standar seperti biasanya. Dengan demikian kalangan dunia usaha bisa memanfaatkan secara maksimal segala fasilitas *trade financing* yang tersedia tanpa harus bertele-tele dalam mengurus dokumen.

*Keempat*, melakukan promosi besar-besaran ke kawasan Eropa mengenai berbagai produk ekspor unggulan Indonesia. Saat ini aktivitas promosi produk ekspor Indonesia memang ada, tapi kurang terpadu dan kurang optimal. Karena itu, sudah saatnya pemerintah memanfaatkan Internasional Trade Promotion Center (ITPC)-ITPC dan berbagai jaringan perwakilan dagang nasional di mancanegara untuk mempromosikan produk-

produk unggulan Indonesia. Di samping itu, keterpaduan promosi juga perlu digalang melalui berbagai kunjungan / misi dagang yang dilakukan baik oleh pejabat-pejabat pemerintah maupun oleh kalangan swasta nasional.

Pada sisi ini kami merasa prihatin dengan keluhan sejumlah eksportir menengah kecil mengenai biaya tinggi dalam pelayanan pelabuhan dan fiskal Rp 1 juta sehingga memberatkan untuk promosi ekspor. Mereka juga menghadapi masalah dengan tidak adanya dukungan dana dari perbankan dan masih adanya biaya tinggi dalam pengurusan barang di pelabuhan. Mereka memperlakukan biaya terminal *handling charge* (THC) sebesar US\$150 per kontainer dan *document fee* yang mencapai US\$20 per dokumen. Biaya sebesar itu untuk saat ini memang sangat memberatkan eksportir karena keuntungan yang mereka peroleh sudah sangat tipis. Untuk itu pemerintah harus serius dalam menindaklanjuti (baca: merealisasikan) keringanan biaya fiskal bagi eksportir dalam bertemu dengan buyer atau mengikuti pameran di luar negeri.

*Kelima*, melakukan penganebaran produk-produk ekspor. Langkah ini penting, karena dengan beragamnya produk yang diekspor, maka importir memiliki banyak pilihan produk untuk mengimpor dari Indonesia. Apalagi untuk diversifikasi produk ekspor ini

sumber daya alam Indonesia sangat melimpah, dan ini belum diolah secara maksimal. Dalam kaitan ini, kita perlu memberikan perhatian yang lebih besar untuk meningkatkan diversifikasi dan nilai tambah dari produk-produk agribisnis, yang kandungan lokalnya sangat besar.

*Keenam*, mengoptimalkan penggunaan fasilitas ekspor yang diberikan oleh negara-negara importir, seperti fasilitas kuota untuk beberapa produk, misalnya TPT, alas kaki dan lain-lain, sehingga peluang itu tidak hilang begitu saja.

*Ketujuh*, perlu adanya iklim usaha yang lebih kondusif sehingga dapat menunjang ekspor, seperti pelebaran *spread* nilai ekspor melalui skema PEBT (pemberitahuan ekspor barang tertentu) yang lebih besar. Dalam skala yang lebih luas pemerintah harus berani memberikan kemudahan-kemudahan/fasilitas-fasilitas yang menunjang kelancaran ekspor. Tanpa langkah tersebut, mustahil kita dapat meningkatkan ekspor di tengah krisis, apalagi nanti dimasa perdagangan bebas.

*Kedelapan*, mengefektifkan kembali Depalindo (Dewan pemakai jasa angkutan laut Indonesia) atau nama kerennya Indonesian National Shipper's Council, yang kini dipercaya oleh kalangan eksportir untuk membantu permasalahan yang sedang dihadapi oleh kalangan

dunia usaha. Dewan ini diharapkan dapat membantu para eksportir Indonesia yang mulai tidak kuat menanggung beban biaya pengapalan yang terus meningkat. Dewan ini, kini, oleh kalangan asosiasi produsen eksportir diminta berdiplomasi menghadapi perusahaan pelayaran asing, yang saat ini dianggap sebagai sumber masalah biaya tinggi itu. Ada tiga jenis pungutan yang dinilai membebankan pengusaha, bahkan tidak berdasar hukum, yakni B/L fee sebesar US\$20 per dokumen, Terminal Handling Charge (THC) yang mencapai US\$160 per kontainer, dan Indonesia Port Additional (IPA) yang berkisar US\$6 -US\$15 per kontainer. Dengan beban seberat itu kini para eksportir sudah benar-benar tidak kuat lagi menjalankan usahanya.

#### Daftar Pustaka:

Abimanyu, Anggito, "Sepuluh Tahun Deregulasi dan Kinerja Perdagangan Luar Negeri Indonesia 1985-1995," *Profil Indonesia* No. 2 Tahun 1996.

Departemen Perindustrian dan Perdagangan Dirjen Perdagangan Internasional, "Penyusunan PETA Keunggulan Komparatif Produk Ekspor Indonesia di Beberapa Pasar Internasional", 1997.

Firdausy, Carunia Mulya, "Ju-

rus-jurus Reformasi Ekonomi dalam Mengatasi Krisis," *AFKAR*, Vol V. No. 1 Tahun 1998.

Gunawan, Anton H, "Prospek dan Potensi Sektor Riil", paper, LPEM-UI.

Indrawati, Sri Mulyani, "APEC: Rencana Aksi Manila dan Implikasinya bagi Indonesia", *Profil Indonesia*, No. 3 Tahun 1997.

Jafar, Mohammad, "Prospek dan Potensi Perikanan di Indonesia," *Profil Indonesia* No. 2 Tahun 1996.

Mihira, Norio, "Permasalahan Perkembangan Industri Kecil dan Menengah," dalam PEP-LIPI, Seminar Pertumbuhan dan Pemerataan, Pengembangan Golongan Ekonomi Lemah, 1993.

Sagir, Soeharsono, "Alternatif Pembiayaan Sektor Usaha," dalam Sutojo, Heru et al., "Profil Usaha Kecil dan Kebijakan Kredit Perbankan di Indonesia," Lembaga Manajemen FE-UI, Jakarta, 1994.

*The Economist Intelligence Unit, Global Economics, World Trade Report 1<sup>st</sup> Quarter 1998.*

The World Bank, *Indonesia in Crisis, A Macroeconomic Update, 1998.*

WTO Secretariat, *World Trade Growth Accelerated in 1997, Despite Turmoil in Some Asia Financial Market, March 1998.* ■